

Interdependensi dalam Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) terhadap Komoditas Tembaga Indonesia

Mufti Kamil Insani¹, Citra Ayu Maharani², Intan Putri³

¹² Universitas Padjadjaran

Email: mufti22001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *The development of the world of trade has greatly affected the system of cooperation at the international level. One of them is evidenced by the increasing number of countries that choose to form trade blocs. The establishment of the Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) is evidence of the formation of trade blocs. Meanwhile, IC-CEPA is a Preferential Trade Agreement (PTA) that was initiated to open wide investment doors and liberalize trade between the two countries, both in the services and goods sectors. The IC-CEPA partnership relationship has triggered pessimism from some parties regarding its impact, which is considered capable of making Indonesia dependent on Chile. In order to examine more deeply the potential for dependence, this phenomenon is reviewed through the perspective of neoliberalism. The analysis shows that the trade relationship between Indonesia and Chile in the IC-CEPA on copper commodities is an interdependent relationship. Through a neoliberal perspective, the IC-CEPA relationship is only a diplomatic instrument that will strengthen the centrality of the Indonesian state and create interdependence in a joint cooperative relationship with Chile. Therefore, the Indonesian state makes IC-CEPA a part of economic diplomacy.*

Keywords: *IC-CEPA, Interdependency, Neoliberalism, Economy Diplomacy*

Abstrak: Perkembangan dunia perdagangan telah banyak mempengaruhi sistem kerjasama pada tingkat internasional. Salah satunya dibuktikan dengan semakin banyaknya negara-negara yang memilih untuk membentuk blok-blok perdagangan. Pembentukan Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) menjadi bukti dari terbentuknya blok-blok perdagangan. Sementara itu, IC-CEPA merupakan Preferential Trade Agreement (PTA) yang diinisiasi guna membuka lebar pintu investasi dan meliberalisasi perdagangan di antara kedua negara, baik pada sektor jasa maupun barang. Hubungan kemitraan IC-CEPA justru memicu rasa pesimis beberapa pihak terkait dampaknya yang dianggap mampu membuat Indonesia ketergantungan terhadap negara Chili. Guna mengkaji lebih dalam terkait adanya potensi ketergantungan, maka fenomena ini ditinjau melalui perspektif neoliberalisme. Hasil analisis menunjukkan apabila hubungan perdagangan antar negara Indonesia dengan Chili dalam IC-CEPA pada komoditas tembaga merupakan hubungan yang saling bergantung. Melalui perspektif neoliberal, hubungan IC-CEPA hanyalah instrumen diplomasi yang akan memperkuat sentralitas negara Indonesia dan menciptakan interdependensi dalam hubungan kerja sama bersama dengan Chili. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadikan IC-CEPA sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.

Kata kunci: IC-CEPA, Interdependensi, Neoliberalisme, Diplomasi Ekonomi

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam perdagangan internasional telah banyak merubah sistem kerja sama internasional. Kondisi ini dipicu karena kegagalan World Trade Organization dalam mengimplementasikan berbagai aturan dan kebijakan perdagangan antar negara di dunia. Kini, negara-negara lebih memilih untuk membentuk blok-blok sebagai upaya regionalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional (Taufiqurrachman & Handoyo, 2021). Indonesia dan Chili menjadi negara yang ikut mengadopsi langkah ini melalui Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA). IC-CEPA merupakan kesepakatan berbentuk Preferential Trade Agreement (PTA) yang ditandatangani pada 14 Desember 2017 dan telah diratifikasi pada 10 Agustus 2019 (Leonardo Lombok, 2021). Tujuan dari pembentukan IC-CEPA adalah untuk mempermudah akses terhadap pasar, teknologi, investasi, dan energi yang akan menguntungkan satu sama lain secara resiprokal. Sehingga, perjanjian ini digadang-gadang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor maupun impor di antara negara Indonesia dan Chili (Sjahril Sabaruddin & Marks, 2016). Pasca diratifikasi oleh kedua negara, IC-CEPA direalisasikan dalam dua tahapan, yaitu perdagangan barang kemudian diikuti oleh perdagangan pada sektor jasa dan investasi (Taufiqurrachman & Dwi Handoyo, 2021). Sayangnya, banyak narasi yang menilai jika IC-CEPA dapat membuat Indonesia mengalami ketergantungan terhadap Chili sebagai salah satu negara pengekspor tembaga terbesar di dunia. Sehingga, dinilai mampu membuat pasokan tembaga negara Indonesia bergantung terhadap negara Chili. Nyatanya, berdasarkan hasil pengolahan data pada periode 2015-2020, neraca perdagangan antara negara Indonesia dan Chili mengalami minus dan surplus secara fluktuatif (Hukma Al Nafi & Adi Nurcahyo, 2021). Pasalnya, pada periode 2016-2018 dan 2020 neraca

impor dari negara Indonesia berhasil mengalami surplus. Walaupun, tidak dapat dinafikan jika pada tahun 2015 dan 2019 negara Indonesia justru sempat mengalami total defisit mencapai USD 48 juta. Namun, angka ini kembali surplus sebesar 0,8% pada tahun 2020 pasca IC-CEPA berhasil ditandatangani oleh kedua negara. Dalam kata lain, pemberlakuan IC-CEPA pada tahun 2020 telah berhasil mendorong neraca perdagangan Indonesia mencapai angka USD 35 juta selama melakukan transaksi bersama negara Chili. Tidak hanya secara itu, negara Indonesia pun nyatanya ikut mendapatkan keuntungan komparatif (Idris, 2023). salah satunya pada komoditas tembaga. Pasalnya, negara Indonesia mendapat tarif 0% pada saat menjual beberapa komoditas ke dalam pasar negara Chili (Cali et al., 2019; Marsanto, 2022). Sebagai imbalan nya, negara Indonesia akan memberikan tarif 0% terhadap komoditas energi dan manufaktur. Sehingga, negara Chili akan memprioritaskan komoditas tembaganya kepada negara Indonesia lewat IC-CEPA. Berdasarkan hasil studi pustaka, belum ada penelitian yang membahas mengenai interdependensi antara Indonesia dan negara Chili dalam komoditas tembaga. Meskipun, salah satu artikel melibatkan aktor Multinational Companies (MNCs), mayoritas dari penelitian terdahulu cenderung membahas permasalahan ini secara makro dan umum. Selain itu, rata-rata artikel pun tidak benar-benar membahas secara spesifik sektor yang dibahas dalam kerja sama Indonesia dan Chili, akan tetapi melakukan pembahasan secara menyeluruh pada kawasan regional, seperti Asia Tenggara, Uni Eropa, Amerika, dan lain-lain (Taufiqurrachman & Dwi Handoyo, 2021). Sehingga belum ada yang melakukan pembahasan hubungan kerja sama di kawasan trans-pacific. Namun, tidak dapat dinafikan jika penelitian ini akan mengangkat perspektif neoliberal layaknya beberapa studi yang telah ada. Karena konteks yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah menguji

narasi tentang ketergantungan Indonesia terhadap Chili pada sektor pertambangan, yaitu komoditas tembaga. Dengan begitu, penelitian ini mengangkat judul “Interdependensi dalam Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) terhadap Komoditas Tembaga Indonesia”.

TINJAUAN PUSTAKA

Diplomasi Ekonomi

Dalam sebuah sistem internasional, diplomasi dapat dikatakan sebagai suatu instrumen penting di suatu negara. Diplomasi mengacu pada kegiatan politik dengan sumber daya yang terampil sebagai unsur utama kekuasaan yang memungkinkan suatu negara dapat menjalankan kebijakan luar negerinya tanpa menggunakan kekerasan maupun propaganda (Berridge, 2010). Dalam arus utama Hubungan Internasional, diplomasi direpresentasikan sebagai instrumen kebijakan luar negeri bersamaan dengan propaganda, imbalan dan hukuman ekonomi, serta ancaman atau penggunaan kekuatan untuk menghancurkan (Holsti, 1967). Konsep klasik diplomasi mendefinisikannya sebagai: 'pelaksanaan hubungan antara negara dan entitas lain yang memiliki kedudukan dalam politik dunia oleh agen resmi dan dengan cara-cara damai' (Bull 1995: 156). Sehingga, dapat dimaknai bahwa diplomasi merupakan sebuah instrumen kebijakan luar negeri yang berguna dalam rangka mencapai kepentingan nasional suatu negara tanpa menggunakan unsur-unsur kekerasan. Dengan demikian, diplomasi umumnya dilakukan melalui cara-cara damai, seperti dialog ataupun negosiasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia saat ini berkembang lebih cepat seiring majunya teknologi informasi dan terjadinya globalisasi.

Hal ini tentunya juga memiliki pengaruh signifikan pada praktik diplomasi kontemporer. Dunia kini mengenal berbagai jenis diplomasi, mulai dari diplomasi budaya, diplomasi

olahraga, diplomasi ekonomi, dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir, diplomasi multilateral yang paling kooperatif adalah diplomasi ekonomi yang berfokus pada negosiasi perdagangan dan investasi (Constantinou, 2016). Diplomasi ekonomi dirancang dan dijalankan oleh suatu pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi nasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi merupakan bagian dari instrumen kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan penggunaan instrumen ekonomi politik (Bergeijk et al., 2011). Zhao Kejin (2011: 59) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai 'kegiatan damai yang dilakukan oleh negara atau persatuan negara untuk menyelesaikan gesekan dan perselisihan di antara negara-negara dalam masalah ekonomi ketika mengimplementasikan kebijakan luar negeri tertentu'. Di sisi lain, Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock memandang diplomasi ekonomi sebagai sebuah proses decision-making (Bayne & Woolcock, 2016).

Namun mereka mengakui bahwa definisi diplomasi ekonomi yang mereka buat paling mendekati definisi yang diberikan oleh Berridge dan James, yang menekankan bahwa diplomasi ekonomi mengacu pada kegiatan yang terjadi di bidang ekonomi internasional. Dalam negosiasi internasional, terdapat interaksi yang sebanding antara berbagai tingkatan yang tersedia dalam diplomasi ekonomi-bilateral, regional, plurilateral, dan multilateral (Bayne & Woolcock, 2016). Dalam diplomasi ekonomi, dimensi regional telah mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu karena adanya keraguan mengenai efektivitas sistem multilateral. Meskipun begitu, dimensi regional menawarkan akses yang lebih cepat untuk membuka pasar. Diplomasi ekonomi plurilateral kurang menarik perhatian dibandingkan dengan regionalisme atau multilateralisme. Namun, badan-badan plurilateral, seperti Organisasi Kerjasama Ekonomi dan

Pembangunan (OECD), KTT G8 dan G20, serta persemakmuran, memiliki dua tujuan penting dalam diplomasi ekonomi. Pertama, mereka dapat menyediakan forum di mana pemerintah nasional berusaha untuk menyelaraskan tujuan ekonomi domestik dan internasional, melalui proses kerjasama sukarela. Kedua, mereka memungkinkan pemerintah yang berpandangan sama untuk mengembangkan posisi yang disepakati yang dapat dimajukan atau diakomodasi dalam konteks multilateral yang lebih luas.

Diplomasi ekonomi multilateral menyediakan keterlibatan semua negara, meskipun hal ini membuatnya rumit. Diplomasi ini menggabungkan rezim-rezim yang terdapat dalam WTO, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, dan pekerjaan ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berbagai organisasi spesialis. Selain pada diplomasi multilateral, hubungan bilateral juga masih menjadi bagian utama dari diplomasi ekonomi, baik itu berupa kesepakatan informal antar negara dalam berbagai isu, atau perjanjian perdagangan atau investasi bilateral formal. Diplomasi ekonomi bilateral masih merupakan teknik yang paling sederhana untuk menjelaskan kepentingan-kepentingan domestik. Namun, teknik ini memberikan keuntungan bagi mitra yang lebih kuat dan dapat dengan mudah berubah menjadi konfrontatif.

Kesepakatan bilateral juga berkontribusi dalam membangun perjanjian yang lebih kompleks di tingkat regional atau global. Secara lebih lanjut, bilateralisme dapat menjadi penting dalam menentukan bagaimana aturan regional atau multilateral harus ditafsirkan. Dalam hal ini, salah satu bentuk diplomasi ekonomi bilateral adalah Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan menghilangkan hambatan perdagangan antara Indonesia dan Chili. Indonesia-

Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menjadi arena dari berbagai jenis Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), hal ini disebabkan oleh lambatnya kemajuan dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menyebabkan banyak negara untuk bergerak menuju kerja sama perdagangan regional dan bilateral untuk meningkatkan perdagangan dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional sebagai penghasil devisa dari ekspor suatu negara merupakan faktor kunci bagi setiap negara untuk mengembangkan kebijakan perdagangan sesuai dengan kebutuhannya.

Pentingnya ekspor menjadi perhatian bagi Indonesia untuk mendeteksi pasar-pasar baru sembari mendalami pasar yang sudah ada dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, tenaga kerja, dan lainnya (Sterzer & Pakkanna, 2020). Indonesia sendiri telah secara proaktif mendorong untuk memperdalam kerja sama ekonomi dengan banyak negara. Setidaknya 25 inisiatif regional atau bilateral telah dipelajari, dinegosiasikan, atau telah mulai berlaku. Dalam hal ini, pasar-pasar di Amerika Latin menempati posisi penting dalam agenda kebijakan perdagangan luar negeri pemerintah Indonesia. Chili tampaknya menarik bagi banyak negara dengan tekadnya untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi di seluruh dunia. Chili telah mampu menarik sejumlah besar investasi asing langsung (FDI) dari seluruh dunia; arus masuk pada tahun 2014 mencapai US\$23,3 miliar (CIE Chili 2015). Chili memandang pembangunan yang terus berlanjut di sekitar Lingkar Pasifik sebagai mesin utama ekspansi ekonomi global, dan melihat hal ini sebagai peluang besar bagi dirinya sendiri. Garis pantai Pasifiknya yang panjang, dikombinasikan dengan sejumlah besar jaringan FTA serta kekuatan komersial dan kemampuan teknisnya baik di sektor publik maupun swasta telah

memungkinkan Chili memposisikan diri sebagai penghubung komersial antara Asia, Amerika Latin, dan Amerika Serikat.

Dengan upaya mengejar hubungan ekonomi internasional dan kebijakan ekonomi internasional dan kebijakan 'melihat ke Timur', Chili dipandang sebagai negara Amerika Latin dengan pendekatan yang paling berkomitmen terhadap kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun 2019, Indonesia dan Chili menjalin kerjasama dan melakukan penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (IC-CEPA). Kerjasama ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya transaksi penjualan dan pembelian baik dari sektor, barang, jasa, dan investasi dari kedua negara tersebut yang dapat meningkatkan devisa dari sektor ekspor impor. Perjanjian ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang Indonesia lihat sebagai keuntungan melakukan perdagangan dengan Chili. Pertama, Chili merupakan anggota dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang bekerja untuk membangun dan membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Kedua, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Chili memiliki garis Pantai yang Panjang sehingga dapat menjadi penghubung kawasan Asia, Amerika Latin, dan Amerika Serikat. Hal ini memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk melakukan perluasan kerjasama perdagangan dan investasi. Terakhir, Chili memiliki beberapa pelabuhan internasional yang tentunya sangat menyokong kegiatan perdagangan. Terdapat dua tahap dalam kerjasama perjanjian IC-CEPA, tahap pertama dimulai dengan perdagangan barang (trade in goods) yang juga mencakup tentang sanitary and phytosanitary, technical barriers to trade, rules of origin, custom procedure, isu legal dan kerjasama ekonomi. Selanjutnya, pada tahap kedua kerjasama ini akan

mencakup tentang jasa dan investasi (service and investment). Perjanjian IC-CEPA yang ditandatangani oleh Indonesia dan Chili ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan ekonomi, mendorong kerjasama kedua negara di bidang potensial, mendorong pengusaha Indonesia untuk mengincar pasar-pasar non tradisional, serta memperluas pangsa pasar di benua Amerika. Dalam pemberlakuan perjanjian IC-CEPA selama kurang lebih satu tahun, Indonesia berhasil mendorong neraca perdagangannya sebesar USD 35 juta pada tahun 2020. Meskipun perjanjian IC-CEPA ini memiliki beberapa manfaat, namun terdapat beberapa pernyataan jika kerjasama ini akan menyebabkan Indonesia memiliki ketergantungan terhadap Chili di sektor tembaga.

Neoliberalisme

Dalam beberapa tahun terakhir, istilah "neoliberalisme" menjadi populer dan banyak digunakan dalam diskusi publik. Neoliberalisme dianggap sebagai versi terbaru dari ekonomi politik klasik yang telah direvisi dalam tulisan-tulisan para ekonom pasar bebas seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman dan para filsuf seperti Robert Nozick. Munculnya neoliberalisme, terutama dipengaruhi oleh karya ekonom seperti Friedrich von Hayek dan Milton Friedman yang menandakan adanya pergeseran prioritas ekonomi dari intervensi pemerintah menuju pasar bebas. Dalam sebuah langkah yang dipelopori oleh 'Reaganisme' di Amerika Serikat dan 'Thatcherisme' di Inggris, terdapat upaya-upaya dilakukan untuk 'memutar kembali' batas-batas negara untuk melepaskan apa yang dianggap sebagai dinamika alamiah pasar. Oleh karena itu, neoliberalisme merupakan suatu bentuk fundamentalisme pasar. Neoliberalisme merupakan salah satu dari pendekatan teoretis utama dalam studi Hubungan Internasional yang menekankan pada gagasan rasionalitas dan kontrak sosial. Dilihat dari asal-

usulnya, neoliberalisme adalah cabang dari perspektif liberalisme yang telah muncul dan berkembang sebagai pesaing utama bagi perspektif neorealisme. Neoliberalisme muncul untuk mengisi kekosongan yang dipengaruhi oleh "kegagalan" neorealisme yang tidak dapat memperkirakan kemungkinan akhir Perang Dingin secara damai.

Pada tahun 1990-an, munculnya neoliberalisme membawa perspektif baru yang menitikberatkan pada upaya organisasi internasional dan entitas non-negara dalam mempromosikan kerjasama internasional. Neoliberalisme yang sering juga disebut 'liberalisme neoklasik' merupakan pembaharuan dari liberalisme klasik dan, khususnya, ekonomi politik klasik. Pilar utama neoliberalisme adalah pasar dan individu. Gagasan utama dari neoliberalisme adalah gagasan bahwa ekonomi akan berjalan dengan baik jika dibiarkan oleh pemerintah, yang mencerminkan kepercayaan pada ekonomi pasar bebas dan individualisme atomistik (Heywood, 2013). Selain itu, neoliberalisme mengakui struktur anarki dalam sistem internasional dan memandang negara sebagai aktor yang bertindak secara rasional.

Namun, neoliberalisme tetap menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dalam situasi anarkis tersebut sebagai fokus utamanya. Oleh karena itu, prinsip kunci yang ditekankan oleh neoliberalisme adalah optimisme terhadap kemungkinan kerjasama dalam sistem internasional yang anarkis. Neoliberalisme memiliki tujuan utama untuk 'mengembalikan batas-batas negara', dengan keyakinan bahwa kapitalisme pasar yang tidak diatur akan menghasilkan efisiensi, pertumbuhan, dan kemakmuran yang meluas. Dalam pandangan ini, keterlibatan aktif negara dalam pasar akan mematikan inisiatif dan menghambat usaha; pemerintah, betapapun berniat baik, selalu memiliki dampak yang merusak pada urusan manusia. Gagasan semacam itu dikaitkan dengan bentuk individualisme yang

keras, yang diungkapkan dalam pernyataan Margaret Thatcher yang terkenal bahwa 'tidak ada yang namanya masyarakat, yang ada hanyalah individu dan keluarganya'. Negara dengan tanggung jawab sosial yang luas; dalam hal ini menyiratkan bahwa negara menjalankan program-program kesejahteraan tidak beralasan dan merendahkan individu dianggap menumbuhkan budaya ketergantungan dan merusak kebebasan, yang dipahami sebagai kebebasan memilih di pasar. Sebaliknya, negara seharusnya menanamkan kepercayaan pada swadaya, tanggung jawab individu, dan kewirausahaan. Gagasan-gagasan seperti ini secara luas dipandang sebagai sesuatu yang berkembang melalui proses globalisasi yang oleh sebagian orang dipandang sebagai globalisasi neoliberal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun referensi yang digunakan berasal dari sumber sekunder melalui beberapa kajian ilmiah terdahulu dan laman informasi resmi dari instansi negara terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IC CEPA sebagai Instrumen Diplomasi Ekonomi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile (IC-CEPA) merupakan salah satu instrumen diplomasi ekonomi Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 2017 dan secara resmi berlaku pada tanggal 10 Agustus 2019. IC-CEPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bilateral dan kerja sama ekonomi antara kedua negara dengan menurunkan tarif secara bertahap dan meningkatkan akses pasar untuk barang dan jasa. Indonesia mendapatkan beberapa manfaat utama dari program ini. Pertama, 89.6% tarif Chili akan dihapuskan, sehingga akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Chili.

Chili juga dapat digunakan sebagai pintu gerbang untuk ekspor Indonesia ke wilayah Amerika Selatan.

Selain itu, perjanjian ini juga menawarkan peluang-peluang baru bagi sektor jasa Indonesia di berbagai bidang seperti arsitektur, teknik, telekomunikasi, distribusi, dan pariwisata. IC-CEPA telah diimplementasikan secara bertahap, dengan tahap pertama difokuskan pada penghapusan tarif komoditas. Hal ini telah menghasilkan peningkatan besar dalam ekspor Indonesia ke Chili, dengan total nilai perdagangan sebesar USD 433,3 juta antara Januari dan September 2022, meningkat 45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perjanjian ini juga telah menghasilkan peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertanian, kehutanan, dan industri. Sebagai contoh, Chili telah setuju untuk menurunkan bea masuk produk pertanian Indonesia seperti mobil, alas kaki, dan pupuk mineral.

Demikian pula, Indonesia telah setuju untuk menurunkan bea masuk atas barang-barang Chili seperti tembaga, anggur, dan kertas. Selain itu, hasil dari perjanjian tersebut adalah peningkatan kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Sebagai contoh, Chili dan Indonesia telah sepakat untuk mengurangi tarif produk pertanian satu sama lain, termasuk pupuk mineral, mobil, sepatu, dan produk kertas. Indonesia menggunakan IC-CEPA sebagai alat diplomasi ekonomi yang penting karena IC-CEPA meningkatkan daya saing ekonomi dan meningkatkan akses ke pasar.

IC-CEPA merupakan bagian dari strategi Indonesia yang lebih luas untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Interdependensi dalam IC-CEPA Neoliberalisme pada dasarnya memiliki empat asumsi menitikberatkan sistem internasional sebagai sistem yang anarki, sehingga negara merupakan satu-satunya

aktor yang rasional. Salah satu bentuk rasionalitas dari negara direalisasikan melalui sikap optimisme negara yang berupaya untuk menjalin kerja sama dalam sistem internasional yang anarkis (Heywood, 2013). Walaupun negara dianggap bukan satu-satunya aktor yang rasional, tetapi pandangan ini negara dianggap memiliki keuntungan yang absolut.

Namun, keuntungan tersebut hanya dapat dicapai melalui jalan kerja sama walaupun tanpa menghiraukan keuntungan dari negara lain. Tidak dapat dinafikan apabila eksistensi dari organisasi internasional tentunya turut andil dalam dinamika global. Hal ini selaras dengan asumsi dari neoliberalisme yang meyakini jika peranan Organisasi Internasional (OI) mampu menjadi langkah preventif dalam menghindari kecurangan yang dilakukan dalam kerja sama. Melalui persepsi itulah akhirnya negara berusaha untuk membentuk institusi-institusi baru yang mampu mengikat dan menjaga kepentingannya agar tetap aman. Salah satu upaya perealiasasiannya adalah melalui pembentukan Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA). IC-CEPA pada dasarnya dicanangkan sebagai upaya pertama negara Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas bilateral bersama di kawasan Amerika Latin (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019). Keputusan ini dinilai mampu untuk menjadikan negara Chile sebagai penghubung produksi ekspor dan impor di kawasan Amerika Latin. Salah satu yang paling disoroti adalah kerjasamanya dalam sektor tembaga dengan kode HS 74.

Tercatat pada tahun 2021, negara Indonesia telah melakukan impor tembaga dengan nilai ditaksir mencapai 51.683,6 USD (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini terus menunjukkan kenaikan pasca IC-CEPA terus berlangsung hingga tahun 2023 berhasil menyentuh angka 78.472 USD (Badan Pusat Statistik, 2024). Kenaikan

intensitas kerja sama dalam sektor tembaga telah membuktikan jika asumsi neoliberalisme terkait konsep kerja sama adalah cukup benar. Adapun asumsi yang mengatakan apabila hubungan IC-CEPA hanya akan membuat negara Indonesia mengalami ketergantungan tidaklah tepat. IC-CEPA justru menampilkan bagaimana negara 2 Indonesia dengan Chili mampu saling memenuhi kebutuhannya, sehingga cenderung membentuk hubungan interdependensi. Interdependensi dalam IC-CEPA pun nyatanya tidak hanya telah membuktikan konsep keuntungan yang absolut. Melainkan ikut membuktikan asumsi dari neoliberalisme yang mengatakan apabila pembentukan institusi dapat mengurangi kompetisi yang ada pada pasar bebas.

KESIMPULAN

IC-CEPA merupakan bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Chili yang ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2017. Perjanjian ini merupakan salah satu bentuk dari diplomasi ekonomi dimana terdapat sebuah kegiatan ekonomi antar kedua negara di sistem internasional seperti yang diungkapkan Berridge. IC-CEPA sebagai salah satu instrumen dari diplomasi ekonomi juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan ekonomi nasional. Dilansir dari laman Free Trade Agreement Center, dengan adanya perjanjian IC-CEPA, terdapat penghapusan tarif Chili terhadap 7.669 produk sebesar 89,6% dari total pos tarif. Secara lebih lanjut, perjanjian IC-CEPA juga berdampak pada diberlakukannya tarif 0% terhadap produk Indonesia, seperti produk manufaktur, produk pertanian, dan produk perikanan di pasar Chili. Kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari perjanjian IC-CEPA ini tentunya dapat meningkatkan nilai ekspor. Seperti yang diketahui, nilai ekspor Indonesia ke Chili mengalami peningkatan sebesar USD 433,3 juta hanya dalam satu tahun. Hal ini tentunya memberikan dampak positif untuk

perekonomian masing-masing negara. Selain itu, pada tahun 2022, Indonesia juga melakukan impor tembaga yang nilainya terus meningkat signifikan sejak ratifikasi perjanjian IC-CEPA. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya perjanjian IC-CEPA tidak menimbulkan ketergantungan Indonesia terhadap Chili. Sebaliknya, perjanjian ini justru menunjukkan hubungan interdependensi atau kesalingbergantungan dimana Chili dapat menjadi pasar produk Indonesia di Amerika Latin sehingga dapat meningkatkan interkoneksi antara kedua negara. Adanya perjanjian ini diharapkan dapat mencerminkan strategi kedua negara untuk mengembangkan akses pasar bebas, meningkatkan investasi dan memperkuat kerjasama ekonomi di berbagai sektor perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024, Maret 13). Impor Tembaga menurut Negara Asal Utama, 2018-2023 - Tabel Statistik.
- Badan Pusat Statistik. Retrieved Juni 4, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistiks-table/1/MjAxOCMx/impor-tembaga-menurut-negara-asal-utama--2018-2023.html>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2016). *THE NEW ECONOMIC DIPLOMACY*.
- Bergeijk, P. A. G. van, Okano-Heijmans, Maaik, & Melissen, Jan. (2011). *Economic diplomacy : economic and political perspectives*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy Theory and Practice (Fourth)*. PALGRAVE MACMILLAN.
- Constantinou. (2016). *The SAGE Handbook of Diplomacy*.
- Darmawan, A. D. (2022, September 20). *Indonesia Paling Banyak Impor Tembaga dari Chili*. Databoks. Retrieved Juni 4, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/indonesia-paling-banyak-impor-tembagadari-chili>

- Dugis V. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik Vinsensio Dugis Heywood, A. (2013). The Palgrave Macmillan POLITICS Fourth Edition.
- Holsti, K. J. (1967). Fourth Edition International Politics a Framework for Analysis.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, April 08). Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Mitra Read more: <https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/>. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/>
- Husada, A. S. P. (2023). Ratifikasi Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC- CEPA): Strategi dan Manfaat. https://www.researchgate.net/publication/376810975_Ratifikasi_Indonesia-Chile_Comprehensive_Economic_Partnership_Agreement_IC-CEPA_Strategi_dan_Manfaat
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2019, November 21). Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Chile Disahkan. Kementerian ESDM. Retrieved Juni 4, 2024, from <https://migas.esdm.go.id/post/ke-mitraan-ekonomi-indonesia-danchile-disahkan>
- Kementerian Perdagangan. (2022, 04 25). <https://ftacenter.kemendag.go.id/pertemuan-bilateral-indonesia-chile-mendag-zulkifli-hasan-sepakati-peningkatan-perdagangan-barang-dan-jasa-kedua-negara>. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. [/bilateral/amerika/chile](https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/amerika/chile)
- Kementrian Perdagangan. (2022, November 21). Pertemuan Bilateral Indonesia-Chile, Mendag Zulkifli Hasan: Sepakati Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Kedua Negara. Free Trade Agreement Center. <https://ftacenter.kemendag.go.id/pertemuan-bilateral-indonesia-chile-mendag-zulkifli-hasan-sepakati-peningkatan-perdagangan-barang-dan-jasa-kedua-negara>
- Marisa, A. (2020). Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement tahun 2019. Jurnal Trend Borders, 4(1), 24-36.
- Sterzer, S., & Pakkanna, A. K. (2020). Comparative Analysis of the Trade Relations of ArgentinaIndonesia and Chile-Indonesia: Their Similarities and Differences. What Can You Learn from the Neighboring Country? Latin American Journal of Trade Policy 8 (2020) .
- Sjahril Sabaruddin S, Marks S. (2016). The Potential Political Economy Impact of the Proposed Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement 2 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Indonesia
- Taufiqqurrachman F., & Handoyo, R. (2021). Analisis Dampak Ic-Cepa Terhadap Perekonomian Indonesia Analysis of the IC-CEPA Impact on the Indonesian Economy